

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Perekonomian Ibu Kota Karut-marut

KETUA Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andriano, menilai penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di ibu kota perlu diperpanjang. Kendati demikian, harus ada pelonggaran sektor ekonomi.

"Perpanjang saja (PSBB). Tapi terkait sektor perekonomian harap dilonggarkan," kata Wibi di Jakarta. Wibi menilai meski PSBB harus diperpanjang, sebaiknya harus ada revisi dalam Pasal 10 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020, khususnya terkait 11 sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama PSBB.

Hal itu, katanya, karena selama PSBB bisa dibidang perekonomian ibu kota sudah karut marut. Misalnya, banyak perusahaan yang gulung tikar, hingga memecat karyawannya. Selain itu, sebaiknya seluruh rumah ibadah kembali dibuka, dengan syarat lokasinya sudah bersih dari paparan virus Corona, kemudian

pelaksanaannya harus memperhatikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

"Rumah ibadah harusnya diperbolehkan, tapi dengan protokol kesehatan," kata dia. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut sedang menyiapkan sebuah protokol khusus untuk nantinya diterapkan di wilayah Ibu Kota. Hal itu dipersiapkan bila nantinya kebijakan PSBB diputuskan tak lagi diperpanjang.

Ia mengatakan kedisiplinan dari masyarakat sendiri merupakan kunci apakah PSBB dilanjutkan atau tidak. Apabila, warga dapat mematuhi, maka diharapkan PSBB tahap ketiga adalah yang terakhir.

PSBB fase ketiga di Jakarta akan berakhir pada 4 Juni 2020. "Apabila semua taat, PSBB bisa berakhir. Nanti kita sampaikan protokol khusus di DKI," kata Anies.



Perpanjang saja (PSBB). Tapi terkait sektor perekonomian harap dilonggarkan.

Wibi Andriano

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta

Zona Merah

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai penerapan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) cukup diperpanjang di zona merah Covid-19 saja.

"Untuk daerah yang dikategorikan merah, tetap PSBB," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono," di Jakarta. Menurut dia, selama berlangsungnya PSBB dari jilid I hingga III ini, seharusnya Pemprov DKI sudah bisa memetakan wilayah-wilayah mana saja yang terlihat tingkat penularannya sudah landai.

"Pemprov dapat melakukan evaluasi

menyeluruh dan memetakan, daerah-daerah yang dikategorikan masuk klaster hijau," ujarnya. Apabila daerah-daerah sudah termasuk klaster hijau, menurutnya, alangkah baiknya sudah diterapkan normal baru yang harus dibarengi dengan penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang ketat.

"Penerapan kebijakan normal baru harus dibarengi dengan pengawasan yang sangat ketat. Sebab kalau itu dianggap oleh masyarakat sebagai kebebasan, akan berakibat fatal dan ongkosnya teramat mahal. Maka membangun kesadaran kolektif masyarakat menjadi hal yang sangat penting," kata dia. (dni)